



**Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat**



Laporan Konsultan Individu Penyebar Luasan Informasi BULAN JUNI

Di Susun Oleh :

Aldi Nur Islami Syahirul Alam S.Kom



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas karunianya sehingga dapat melakukan penyusunan Laporan Bulanan Juni Kegiatan Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Infrastruktur Daerah. Laporan Bulanan Juni ini dimaksudkan untuk mempersiapkan bahan Penyebar Luasan Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mengoptimalkan upaya melaksanakan penyusunan, koordinasi, dan fasilitas infrastruktur daerah, pengelolaan data dan penyebarluasan informasi dana alokasi khusus sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/ 2020. Laporan Bulanan Juni dibuat sebagai bentuk penjelasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan terhadap rangkaian tahunan Kegiatan Penyebar Luasan Infrastruktur Daerah, Bidang Perencanaan Fasilitas Infrastruktur Daerah.

Sistematika Laporan ini terdiri atas latar belakang pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan kegiatan serta kesimpulan dan saran kegiatan.

Terima kasih terhadap seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa data, informasi, dan diskusi terkait kegiatan Koordinasi Perencanaan Dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembinaan Bidang Infrastruktur sehingga Laporan Bulanan Juni ini selesai sebagaimana mestinya. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juni 2024

Aldi Nur Islami Syahirul Alam S.Kom





DAFTAR ISI

1	BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1	LATAR BELAKANG.....	3
1.2	DASAR HUKUM	4
1.3	TUJUAN	5
1.4	LINGKUP KEGIATAN	5
1.5	WAKTU & TEMPAT	5
	BAB 2 ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN	6
1.6	PEMAHAMAN TERHADAP PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN	6
1.6.1	Pembuatan Fitur Rekapitulasi Immediate Outcome	6
1.6.2	Penambahan Fitur Rekapitulasi IO (Air Minum, sanitasi dan perumahan & permukiman) dan Total Rekapitulasi Sanitasi.....	7
1.6.3	Pembuatan akun BAPPENAS, ATR dan BAPPENAS PERKIM & Pembuatan akun BPPW Sumatera Barat	8
1.6.4	Perbaikan Fitur.....	9
1.6.5	Penyesuaian Data dan Tampilan.....	10
1.6.6	Permintaan Data dan Dokumen.....	11
	BAB 3 PENUTUP	13
1.7	KESIMPULAN	13
1.8	SARAN	13
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	14



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum merupakan pendorong bagi terlaksananya pembangunan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing global Indonesia. Mengacu pada Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam penyusunan strategi, kebijakan umum, proyek strategis, program Kementerian/Lembaga dalam pembangunan Nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu Kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan 9 misi pembangunan nasional yang di sebut dengan *Nawacita* tahap Kedua.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Kementerian PUPR memiliki bagian dalam mendukung terlaksananya **misi ke-2** dalam *Nawacita* tahap Kedua yakni, Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dibentuk Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah sebagai *techno structure* dan dapat berkoordinasi dengan eksternal serta membuat kebijakan terkait infrastruktur daerah. PFID merupakan organisasi Eselon II dibawah Sekretariat Jenderal dan memiliki fungsi dalam memfasilitasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraa infrastruktur daerah. Berdasarkan uraian diatas posisi Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah dalam mendukung sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan **sasaran strategis poin 5** yakni, **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya**. Dalam organisasi ini terdiri dari 4 bidang dan 1





sub bidang yang masing-masing menangani pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada bidang Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air, Perumahan dan Permukiman dan terdapat bidang perencanaan yang fungsinya melaksanakan penyusunan, koordinasi, dan pembinaan teknis keterpaduan perencanaan penyelenggaraan fasilitas infrastruktur daerah, pengolahan dan dan penyebaran informasi.

Laporan Bulanan Konsultan Individu Bidang Perencanaan Fasilitas Infrastruktur Daerah disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya. Adapun dalam hal ini dilakukan oleh Tenaga Ahli Muda Perencana dalam melaksanakan tugasnya mendukung Kegiatan Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Fasilitas Infrastruktur Daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan program/kegiatan pada dasarnya harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang dapat dipatuhi dan berlandaskan hukum (berpayung hukum) agar program/kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pekerjaan ini diantaranya, yaitu :

1. UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/ SPPN;
3. UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
6. UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (dan PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN);
7. UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. UU nomor 9 tahun 2020 tentang APBN TA.2021;
9. UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
10. PP nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. PP nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
12. PP nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. PP nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
14. PP nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Permen PUPR No.13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;





16. Permen PUPR No.08/PRT/M/2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur PUPR.
17. Perpres RI nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
18. Perpres RI nomor 86 tahun 2021 Tentang RKP Tahun 2020;
19. Perpres RI nomor 15 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2024;
20. Permen PU nomor 01/PRT/M/2014 Tentang SPM Bidang PU dan PR;
21. Permen PERA nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang SPM Bidang PERA Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

1.3 TUJUAN

Laporan Bulanan disusun sebagai salah satu keluaran, sesuai kerangka acuan kerja, dari kegiatan swakelola Penyebar Luasan Informasi perencanaan infrastruktur daerah.

Adapun tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perencanaan yang memadukan 3 (tiga) bidang yaitu jalan, sumber daya air dan permukiman. Laporan ini disusun sebagai hasil pelaksanaan pekerjaan selama bulan berkenaan.

1.4 LINGKUP KEGIATAN

Laporan Bulanan Juni yang disusun ini memiliki ruang lingkup atau lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Muda selama bulan Juni yaitu :

1. Pembuatan Fitur Rekapitulasi Immediate Outcome
2. Penambahan Fitur Rekapitulasi IO (Air Minum, sanitasi dan perumahan & permukiman) dan Total Rekapitulasi Sanitasi
3. Pembuatan akun BAPPENAS, ATR dan BAPPENAS PERKIM & Pembuatan akun BPPW Sumatera Barat
4. Perbaikan Fitur
5. Penyesuaian Data dan Tampilan
6. Permintaan Data dan Dokumen

1.5 WAKTU & TEMPAT

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan waktu pelaksanaan selama tahun anggaran 2024 untuk mengetahui evaluasi dukungan yang dilakukan.





BAB 2 ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN

1.6 PEMAHAMAN TERHADAP PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat nomor 8 tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Tahapan pengelolaan DAK terdiri dari perencanaan, pemrograman, pembinaan pengawasan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kebijakan penyelenggaraan DAK mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah, sebagai upaya mewujudkan prioritas nasional yang meliputi bidang irigasi, bidang jalan, bidang air minum, bidang sanitasi dan bidang perumahan permukiman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID) mempunyai tugas memfasilitasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi mempunyai tugas memfasilitasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur daerah. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah terdiri atas Bidang Perencanaan Fasilitas Infrastruktur Daerah, Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sumber Daya Air Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Perumahan dan Permukiman.

1.6.1 Pembuatan Fitur Rekapitulasi Immediate Outcome

Dalam rangka mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi hasil (Immediate Outcome) yang berkaitan dengan bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan, telah dilakukan langkah-langkah esensial dalam proses pembuatan dan implementasi fitur penginputan data yang bertujuan untuk mengakomodasi dan mempermudah pelaporan serta analisis dampak yang cepat dan akurat.





Langkah awal melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan informasi terkait Immediate Outcome di bidang yang dimaksud. Dengan merinci berbagai jenis hasil segera yang diharapkan, seperti peningkatan akses terhadap air bersih, peningkatan sanitasi, atau perkembangan perumahan, tahap analisis ini memberikan landasan yang kuat dalam pengembangan fitur yang relevan dan efektif.

Fitur penginputan data ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan pengalaman pengguna yang mudah. Formulir yang disediakan menyesuaikan dengan jenis data yang diinputkan, meminimalkan potensi kesalahan dan memastikan integritas informasi. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan pengunggahan dokumen pendukung.

Data yang diinputkan melalui fitur ini disimpan dalam pangkalan data terpusat yang terjamin keamanannya. Proses penginputan dan penyimpanan dilakukan dengan standar keamanan tinggi, mengamankan data dari potensi ancaman atau manipulasi.

Untuk memastikan kualitas dan akurasi data yang diinputkan, fitur ini juga dilengkapi dengan mekanisme validasi dan verifikasi. Tim verifikasi akan melakukan pengujian terhadap data yang diinputkan, serta memverifikasi keabsahan perubahan Immediate Outcome yang dilaporkan.

1.6.2 Penambahan Fitur Rekapitulasi IO (Air Minum, sanitasi dan perumahan & permukiman) dan Total Rekapitulasi Sanitasi

Pada bulan Juni 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan penambahan fitur penting dalam sistem informasi pengelolaan proyek infrastruktur. Fitur baru ini adalah Rekapitulasi Immediate Outcome (IO) yang mencakup bidang Air Minum, Sanitasi, serta Perumahan dan Permukiman. Penambahan fitur ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi dampak langsung dari berbagai proyek infrastruktur yang telah dan sedang dilaksanakan. Dengan adanya rekapitulasi IO, data mengenai akses air minum, kondisi sanitasi, dan status perumahan serta permukiman dapat diakses secara lebih terstruktur dan komprehensif, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan di masa mendatang.



Fitur Rekapitulasi IO bidang Air Minum menyediakan informasi rinci tentang peningkatan akses dan kualitas air minum di berbagai daerah. Data yang terhimpun meliputi jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih baru, kualitas air yang disediakan, serta efisiensi distribusi air. Fitur ini memungkinkan pemantauan lebih akurat terhadap program-program yang bertujuan meningkatkan akses air bersih, serta membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di sektor air minum.

Sementara itu, fitur Rekapitulasi IO bidang Sanitasi fokus pada peningkatan kualitas dan akses sanitasi di permukiman penduduk. Data yang dihimpun mencakup jumlah fasilitas sanitasi baru yang dibangun, peningkatan akses sanitasi layak bagi rumah tangga, serta pengelolaan limbah yang lebih efisien. Informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek sanitasi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Fitur ini juga mendukung evaluasi program-program sanitasi dan membantu dalam perencanaan ke depan untuk meningkatkan kondisi sanitasi di berbagai daerah.

Selain itu, penambahan fitur Total Rekapitulasi Sanitasi memberikan gambaran menyeluruh tentang seluruh kegiatan sanitasi yang telah dilaksanakan. Fitur ini mencakup data kumulatif mengenai pembangunan fasilitas sanitasi, peningkatan akses, serta perbaikan kualitas layanan sanitasi di seluruh Indonesia. Dengan fitur ini, Kementerian PUPR dapat dengan mudah melihat perkembangan dan pencapaian di sektor sanitasi, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih. Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa semua proyek sanitasi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penambahan fitur-fitur ini merupakan bagian dari komitmen PUPR untuk terus meningkatkan pengelolaan dan kualitas infrastruktur, guna mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

1.6.3 Pembuatan akun BAPPENAS, ATR dan BAPPENAS PERKIM & Pembuatan akun BPPW Sumatera Barat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berhasil menyelesaikan proses pembuatan akun BAPPENAS, ATR, dan BAPPENAS PERKIM untuk menu "Bidang Perumahan - Rekapitulasi Readiness Criteria" Tahun 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk



meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam mengelola dan memantau kesiapan proyek perumahan. Akun-akun ini memungkinkan pemangku kepentingan dari BAPPENAS, ATR, dan BAPPENAS PERKIM untuk mengakses data dan informasi terkait kriteria kesiapan proyek perumahan, termasuk status persiapan lahan, perizinan, anggaran, serta kesiapan teknis dan operasional. Dengan akses ini, koordinasi antar lembaga menjadi lebih baik, dan pemantauan serta evaluasi proyek dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan proyek infrastruktur di wilayah Sumatera Barat, PUPR juga telah menyelesaikan pembuatan akun untuk Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat. Akun ini dirancang untuk mendukung BPPW dalam mengakses berbagai sistem informasi yang relevan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek infrastruktur. Dengan adanya akun ini, BPPW Sumatera Barat dapat mengunggah laporan kemajuan proyek, mengajukan permohonan bantuan teknis, serta menerima pembaruan dan instruksi dari pemerintah pusat dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, pembuatan akun-akun ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PUPR untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur. Dengan akses yang lebih baik terhadap data dan informasi, serta peningkatan koordinasi antar lembaga, diharapkan proyek-proyek yang direncanakan dapat terlaksana dengan lebih baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

1.6.4 Perbaikan Fitur

Pada bulan Juni 2024, telah dilakukan perbaikan pada fitur rekapitulasi dan unduhan Immediate Outcome (IO) di bidang Air Minum. Perbaikan ini mencakup peningkatan akurasi data rekapitulasi dan optimalisasi fungsi unduhan sehingga data terkait pencapaian dan dampak proyek air minum kini dapat diakses dan diunduh dengan lebih mudah dan lengkap. Dengan adanya pembaruan ini, pengguna dapat memperoleh laporan yang lebih akurat dan





komprehensif, yang pada gilirannya akan mendukung proses pemantauan dan evaluasi program-program peningkatan akses air bersih di berbagai daerah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PUPR untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan infrastruktur air minum.

Pada bulan yang sama, telah melaksanakan perbaikan penting pada fitur upload dokumen Immediate Outcome (IO) yang sebelumnya mengalami kendala teknis, sehingga dokumen tidak dapat diunggah secara langsung. Perbaikan ini melibatkan pembaruan sistem pengunggahan dokumen dan peningkatan stabilitas platform untuk memastikan proses unggah dapat berjalan lancar dan efisien. Dengan adanya perbaikan ini, pengguna kini dapat mengunggah dokumen IO tanpa hambatan, yang akan memudahkan dalam penyampaian laporan dan dokumentasi terkait pelaksanaan proyek infrastruktur.

Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada fitur Outcome IO di bidang jalan, di mana data yang ditampilkan kini lebih akurat dan terperinci. Fitur ini mencakup informasi mengenai peningkatan kondisi jalan, jumlah proyek yang telah diselesaikan, dan dampak langsung dari proyek-proyek tersebut terhadap mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Dengan data yang lebih transparan dan komprehensif, pemerintah pusat dan daerah dapat lebih mudah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program pembangunan jalan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam pengelolaan proyek infrastruktur jalan.

Khusus untuk Kabupaten Karo, perbaikan fitur juga mencakup penambahan data mengenai kecepatan rata-rata kendaraan. Informasi ini sangat penting untuk menilai kinerja infrastruktur jalan di daerah tersebut dan dampaknya terhadap efisiensi transportasi. Dengan data kecepatan rata-rata yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi titik-titik kemacetan dan area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Ini merupakan bagian dari upaya PUPR untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

1.6.5 Penyesuaian Data dan Tampilan

Dalam evaluasi terhadap berkas berita acara proyek infrastruktur PUPR, ditemukan



bahwa tidak tercantum nilai target dan realisasi yang seharusnya dalam berkas Word berita acara. Kekurangan ini mengurangi transparansi dan akurasi evaluasi kinerja proyek, yang merupakan elemen penting dalam pemantauan dan pelaporan progres. Penting untuk memastikan bahwa setiap berkas berita acara mencakup informasi yang komprehensif dan relevan, termasuk nilai target dan capaian aktual proyek yang sedang dilakukan.

Selain itu, dalam proses pelaporan, terdapat kesulitan dalam menampilkan output dengan satuan kilometer (KM) secara terpisah dan dengan jelas membedakan antara dua output yang memiliki satuan yang sama. Hal ini menjadi penting karena detail yang lebih terperinci memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap capaian proyek serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat dalam pengembangan proyek selanjutnya.

Perlu juga diperhatikan bahwa penulisan "Output" harus konsisten dengan komponen yang terdapat dalam KRISNA, sistem yang digunakan untuk merekam dan melaporkan data proyek. Konsistensi ini tidak hanya meningkatkan kejelasan dalam dokumentasi, tetapi juga mempermudah analisis data yang dilakukan oleh pihak terkait.

Di samping itu, untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi data, sangat penting untuk mencantumkan nilai "0" secara eksplisit pada target untuk output tambahan yang tidak memiliki target yang spesifik. Langkah ini akan memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam berkas berita acara memiliki kejelasan dan ketelitian yang dibutuhkan.

Terakhir, perubahan satuan dari kilometer (KM) menjadi meter (M) untuk kegiatan "Penggantian Jembatan" dalam kolom rincian kegiatan di menu lama rekapan harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan spesifikasi teknis yang berlaku dalam pelaporan proyek infrastruktur PUPR. Kesesuaian ini penting untuk menjaga akurasi dan konsistensi data yang disajikan kepada pihak terkait dan masyarakat umum.

1.6.6 Permintaan Data dan Dokumen

Dalam rangka menjalankan instruksi dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, kami telah melakukan penyiapan data untuk paket Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 - 2024. Langkah-langkah yang kami ambil meliputi identifikasi proyek-proyek prioritas, perencanaan anggaran yang detail, dan penyusunan dokumen proposal yang komprehensif sesuai dengan



persyaratan teknis dan administratif. Kami yakin bahwa persiapan yang kami lakukan akan memastikan kelancaran dan keberhasilan implementasi proyek-proyek infrastruktur PUPR yang tercakup dalam DAK tersebut, serta tetap mengedepankan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Dalam konteks permintaan dokumen rekapitulasi ceklis Immediate Output Kecepatan Jalan, kami telah melakukan proses pengumpulan dan analisis data terkait. Dokumen ini penting untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan yang dilakukan dalam proyek infrastruktur PUPR. Pengumpulan data meliputi pencatatan kecepatan jalan saat sebelum dan setelah intervensi, serta analisis dampak terhadap lalu lintas dan pengguna jalan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya pemeliharaan jalan dapat meningkatkan efisiensi transportasi serta keamanan pengguna jalan, sesuai dengan standar teknis dan keselamatan yang berlaku dalam bidang PUPR.

Dalam respons terhadap permintaan data mengenai Output 2019 - 2024 dan Outcome dari kelima bidang dalam bidang PUPR, kami telah menyusun laporan yang mencakup analisis mendalam terhadap capaian proyek-proyek infrastruktur selama periode tersebut. Data output mencakup pencapaian fisik seperti kilometer jalan yang dibangun, jumlah jembatan yang direnovasi, dan kapasitas air yang dibangun. Sementara itu, outcome dievaluasi berdasarkan dampak sosial-ekonomi seperti peningkatan aksesibilitas, pengurangan waktu perjalanan, peningkatan kualitas air, dan efisiensi energi. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi proyek PUPR terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



BAB 3 PENUTUP

1.7 KESIMPULAN

Dari hasil analisis pelaksanaan kegiatan infrastruktur PUPR, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah mengikuti proses yang terstruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pelaksanaan proyek-proyek tersebut untuk mendukung prioritas nasional, seperti bidang air minum, sanitasi, dan perumahan. Fitur Rekapitulasi Immediate Outcome juga memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan pemantauan terhadap dampak sosial-ekonomi proyek, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Perbaikan fitur-fitur seperti validasi data yang lebih ketat dan penyajian informasi yang lebih terinci akan terus diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas data yang dihasilkan.

1.8 SARAN

Untuk saran ke depan, disarankan untuk terus meningkatkan keefektifan dan efisiensi sistem Rekapitulasi Immediate Outcome, termasuk dengan mempertimbangkan integrasi teknologi yang lebih maju untuk pemantauan secara real-time. Selain itu, peningkatan dalam pelatihan dan kapasitas SDM terkait dengan penggunaan sistem ini juga perlu diprioritaskan, agar seluruh pihak yang terlibat dapat mengoptimalkan manfaat dari fitur-fitur yang disediakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur PUPR dapat terus berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Kawat Besi	kg	100
2	Kawat Baja	kg	100
3	Kawat Besi	kg	100
4	Kawat Baja	kg	100

Total

Jumlah

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Status	Catatan
1	Kawat Besi	kg	100	1000	100000	OK	
2	Kawat Baja	kg	100	1000	100000	OK	
3	Kawat Besi	kg	100	1000	100000	OK	
4	Kawat Baja	kg	100	1000	100000	OK	
5	Kawat Besi	kg	100	1000	100000	OK	
6	Kawat Baja	kg	100	1000	100000	OK	
7	Kawat Besi	kg	100	1000	100000	OK	
8	Kawat Baja	kg	100	1000	100000	OK	
9	Kawat Besi	kg	100	1000	100000	OK	
10	Kawat Baja	kg	100	1000	100000	OK	



The screenshot shows a Google Sheet titled "Kalkulasi Biaya Pokok Bersih". The sheet is organized into columns: "Kategori", "Detail", "Jumlah", "Harga Satuan", "Total Biaya", and "Total Biaya Bersih". The data is as follows:

Kategori	Detail	Jumlah	Harga Satuan	Total Biaya	Total Biaya Bersih
Bahan Baku	1. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	2. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	3. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	4. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	5. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	6. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	7. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	8. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	9. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	10. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	11. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	12. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	13. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	14. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	15. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	16. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	17. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	18. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	19. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	20. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	21. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	22. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	23. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	24. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	25. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	26. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	27. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	28. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	29. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	30. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	31. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	32. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	33. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	34. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	35. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	36. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	37. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	38. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	39. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	40. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	41. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	42. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	43. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	44. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	45. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	46. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	47. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	48. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	49. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	50. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	51. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	52. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	53. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	54. Bahan Baku	100	1000	100000	100000
Bahan Baku	55. Bahan Baku	100	1000	100000	10000

The screenshot displays the SAP S/4HANA 'Kontrollierte Auftragsbearbeitung' (Controlled Order Processing) interface. The main table lists orders with columns for order type, status, and dates. A blue circle highlights the 'Kontrollierte Auftragsbearbeitung' section, which includes a table of orders and a 'Kontrollierte Auftragsbearbeitung' button. The table shows orders with status 'Kontrolliert' and dates ranging from 2020-01-01 to 2020-01-31. The 'Kontrollierte Auftragsbearbeitung' button is located at the bottom right of the table.

Project Information		Financial Summary		Operational Metrics		Compliance & Risk	
Project ID	Project Name	Budget (USD)	Actual Cost (USD)	Progress (%)	Quality Score	Audit Status	Risk Level
P001	Website Redesign	120,000	115,000	85%	4.2	Completed	Low
P002	Mobile App Development	250,000	260,000	60%	3.8	In Progress	Medium
P003	Cloud Migration	300,000	290,000	90%	4.5	Completed	Low
P004	CRM Integration	180,000	175,000	70%	4.0	In Progress	Medium
P005	Security Audit	75,000	78,000	100%	4.8	Completed	Low





[illegible][illegible]



No.	PILIHAN	REVISI	REVISI	OUTPUT				PENGGANTIAN			
				TAHAP 1	REVISI 1	REVISI 2	% LAKSANA	TAHAP 1	REVISI 1	TAHAP 1	REVISI 1
3	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	70,00	70,00	100	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	70,00	70,00	100	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	70,00	70,00	100	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	70,00	70,00	100	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	70,00	70,00	100	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	70,00	70,00	100	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	70,00	70,00	100	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	70,00	70,00	100	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	70,00	70,00	100	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	70,00	70,00	100	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
8	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	70,00	70,00	100	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	70,00	70,00	100	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00